

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1. PENGANTAR**

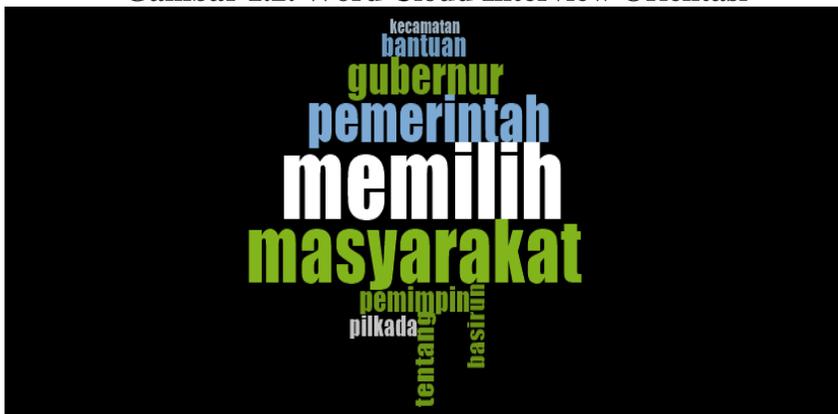
Berdasarkan lingkup teori Orientasi kognitif, adalah bagaimana kemampuan seseorang individu yang berkaitan dengan kepercayaannya serta keyakinannya terhadap jalannya suatu sistem politik dan atribut yang mengikutinya, seperti pemegang jabatan, tokoh pemerintahan, negara, eksekutif, legislatif, kebijakan, kepala negara, bentuk negara, mata uang dan lain sebagainya. Orientasi afektif dalam hal ini berkaitan dengan perasaan emosional yang dimiliki seorang individu ketika berhadapan dengan sistem politik. Hal ini mengacu pada perasaan warga negara akan sistem politiknya dan perasaan yang dapat membuat seseorang menerima atau bahkan menolak sistem politik tersebut. Mengenai orientasi evaluatif dalam hal ini membicarakan kemampuan atau kapasitas seseorang atau individu dalam upaya memberikan penilaian serta respon pada sistem politik yang berjalan dan melihat bagaimana peranan individu tersebut didalamnya (Almond dan Verba, 1984).

#### **5.2. Orientasi kognitif**

Sejak menerima kepengurusan Negara Pilkada bagi masyarakat Suku Laut merupakan salah satu kewajiban memberi suara yang harus dilakukan.

Masyarakat Suku Laut sangat menghindari kontak atau konflik dengan masyarakat di luar dari masyarakat Suku Laut, hal tersebutlah yang nantinya akan mendukung membentuk nilai kepatuhan terhadap instruksi Pemerintah yang akan penulis ulas lebih dalam, termasuk dalam konteks Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 yang mana masyarakat Suku Laut ikut berpartisipasi di dalamnya. Pada tingkat keyakinan dan kepercayaan masyarakat Suku Laut terhadap sistem Pilkada, masyarakat Suku Laut lebih kepada menunggu dan menyerahkan segala urusan untuk diatur oleh pemerintah, hal tersebut bisa dilihat dari hasil olah data interview pada Gambar 1.2, yang mana kata *pemerintah* adalah saalah satu kata yang muncul dari hasil olah data.

**Gambar 1.2. Word Cloud Interview Orientasi**



Sumber: Coding Data Interview Nvivo 12 Plus 2020.

**Table 1.6. Keterangan Gambar 1.1.**

<b>No</b>	<b>Kata</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Kata</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	Pemerintah	Suku Laut mengikuti Instruksi Pemerintah	46	1,29
<b>2</b>	Basirun	Nurdin Basirun Lebih dikenal Suku Laut	26	0,73
<b>3</b>	Memilih	Ikut sertanya memilih dalam Pilkada	69	1,94
<b>4</b>	Bantuan	Menerima bantuan dari kandidat calon	28	0,79
<b>5</b>	Masyarakat	Keputusan mengikuti masyarakat ramai	59	1,66
<b>6</b>	Kecamatan	Relasi Suku Laut hanya Kecamatan dan Desa	21	0,59

Sumber: Olahan Peneliti coding Nvivo 12 Plus 2020.

Tingkat pengetahuan masyarakat Suku Laut terhadap Pilkada dapat dikatakan sangat rendah (Table 1.3. Tingkat pendidikan masyarakat Suku Laut). Tidak ada pemahaman yang khusus atau mendalam masyarakat Suku Laut terhadap aspek Pilkada, bahkan satu-satunya kandidat pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 yang mereka ingat dengan baik adalah kandidat Nurdin Basirun yaitu Calon wakil Gubernur yang berpasangan dengan M. Sani. Ingatan tersebut dikarenakan adanya beberapa kontribusi bantuan yang telah diberikan oleh kandidat tersebut (gambar 1.3. Sentiment sikap masyarakat Suku Laut). Melihat dari sisi lain, pada aspek partisipasi

masyarakat Suku Laut terhadap Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 sangat tinggi (Table 1.5. Daftar pemilih tetap dan tabel 1.6. Kemunculan kata memilih). Keadaan ini tentunya membawa kita berpikir bahwa hari ini pendidikan di Indonesia masih belum merata. Keadaan tersebut juga sesuai dengan kajian (Jumili Arianto, 2017; Payerli Pasaribu, 2017) bahwa perubahan budaya politik hanya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju namun tidak untuk daerah terpencil dan peran penting partai politik adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Keikutsertaan dalam Pilkada bagi masyarakat Suku Laut seolah memberikan harapan perbaikan kehidupan mereka ke depan, namun hal tersebut tidak didukung dengan pengetahuan yang mumpuni.

Menurut (Ilyas Abdullah dkk, 2018; Achmad Munif Khoirul, 2015; Jumili Arianto, 2017) kesadaran masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya partisipasi akan menjadi tolak ukur berkembangnya budaya politik masyarakat dalam menjamin terciptanya masyarakat demokrasi yang adil dan makmur, bukanlah masyarakat yang menjadi panggung bermain para elit politik. Dalam konteks masyarakat Suku Laut memandang pemimpin yang mereka pilih merupakan panutan dan tulang punggung yang bisa memberikan jalan keluar yang mereka hadapi untuk perbaikan kehidupan. Artinya kemakmuran juga menjadi tujuan masyarakat Suku Laut Hari ini. Saat ini masyarakat Suku Laut merupakan masyarakat yang sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh individu atau kelompok

kepentingan tertentu, hal tersebut dikarenakan masyarakat Suku Laut saat ini hampir tidak bisa membedakan antara kelompok Non-kepentingan dan kelompok kepentingan. Minimnya pengetahuan terhadap sistem politik tetapi merindukan suatu perubahan hidup yang lebih baik, telah membawa masyarakat Suku Laut kepada sikap menerima segala macam instruksi.

### **5.3. Orientasi Afektif**

Afektif atau sikap adalah respon yang dikeluarkan seseorang terhadap apa yang terjadi dalam hal ini sikap terhadap sistem politik. Perasaan masyarakat Suku Laut, input dan outputnya terhadap jalannya sistem politik khususnya mengenai Pilkada Gubernur tahun 2015. Menurut Dediarmann (2017) yang mengutip Lenhart dan Chou mengatakan bahwa sebelum adanya kebijakan pemukiman tahun 1980-1990-an, kebudayaan Suku Laut sekalipun masih tampak elemen-elemen budaya Melayu, tetapi sebenarnya berbeda dengan budaya masyarakat Melayu, dengan sistem kekerabatan yang kuat, dipimpin oleh seorang laki-laki dengan relasi antargender bersifat egaliter dan menganut sistem kepercayaan animisme. Lebih lanjut Menurut kajian (Haryono dan Supentri, 2016; Desma, Yulia, 2017; Hasbullah, Pawira, 2017; Firdaus, 2016) telah terjadi perubahan pola kehidupan masyarakat Suku Laut yang saat ini belum mampu diberdayakan oleh pemerintah, baik itu perubahan dari segi penggunaan bahasa maupun sendi-sendi kehidupan lain, hal tersebut

dipengaruhi oleh faktor Agama, teknologi, pendidikan, geografis, interaksi sosial dan pemerintah.

Pada masyarakat Suku Laut yang penulis teliti istilah pemimpin telah berganti dengan istilah seseorang yang dituakan, dengan sistem kepercayaan rata-rata menganut ajaran Agama Islam. Manakala dihadapkan dengan sistem politik Pilkada, kekerabatan masyarakat Suku Laut yang kuat atau masyarakat sekitar Suku Laut lebih sering menyebutnya dengan istilah kekompakan menjadi pudar atau tidak berlaku. Pemimpin atau seseorang yang dituakan masyarakat Suku Laut tidak memiliki akses apapun dalam upaya menjebatani masyarakatnya membuat keputusan terkait Pilkada. Artinya masyarakat Suku Laut memiliki perasaan bahwa Pilkada merupakan urusan mereka sendiri-sendiri dan segala urusan mengikuti keputusan yang diatur oleh Pemerintah setempat. Relasi yang terjalin pada masyarakat Suku Laut sejauh ini bisa dibilang nihil, selain dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa masyarakat Suku Laut tidak memiliki relasi apapun yang berkaitan dengan politik Pilkada (tabel 1.6. frekuensi kemunculan kata Kecamatan). Masyarakat Suku Laut memiliki karakteristik yang sangat tertutup, hal tersebut membuat sulit terbangunnya relasi antara masyarakat Suku Laut dengan Pemerintah, kandidat Pilkada atau relawan partai. Selain Pemerintah Desa, Kecamatan dan momen Pilkada, bagi masyarakat Suku Laut tidak ada lagi ruang dimana mereka bisa menyampaikan aspirasi. Minimnya relasi yang terjalin antara

masyarakat Suku Laut dengan pemerintah maupun elit-elit politik memberikan dampak sikap menerima apapun termasuk penerimaan mereka terhadap pelibatan dalam politik Pilkada yang dilaksanakan 5 tahun sekali, hal tersebut bisa dilihat dari tabel 1.5 daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat Suku Laut.

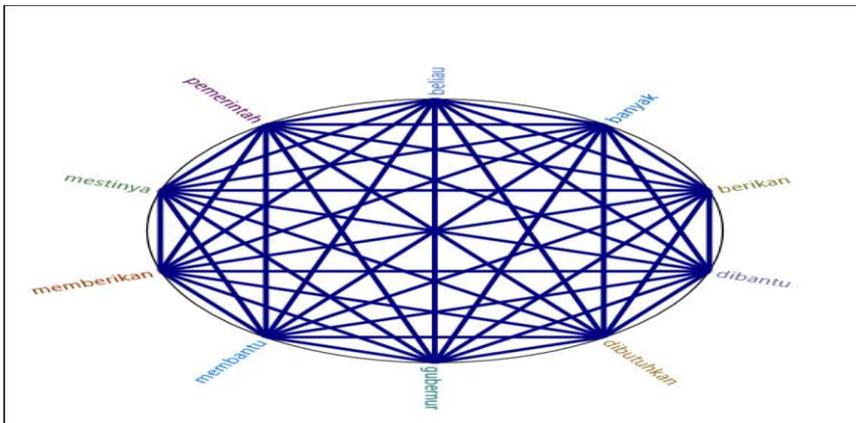
Berdasarkan data Table 1.5 yang sebelumnya telah penulis cantumkan dapat memberikan bukti bahwa masyarakat Suku Laut memang sudah tercantum dan diikutsertakan dalam momen Pilkada, artinya masyarakat Suku Laut telah menerima Sistem Pilkada tersebut dengan didukung partisipasi yang terbilang tinggi, sekalipun pada aspek orientasi kognitif masyarakat Suku Laut terkesan sangat kurang. Lebih lanjut hal-hal yang harus didalami lagi adalah terkait minat masyarakat terhadap aspek-aspek politik. Masyarakat Suku Laut Kecamatan Singkep Barat masih sangat rendah ketertarikannya terhadap aspek-aspek politik, masyarakat Suku Laut terkesan belum siap dan kurang peduli terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan politik. Merujuk pada kajian Justus K. Musya, dkk (2017) mengungkapkan bahwa dalam memanfaatkan etnis untuk mencapai tujuan politik kekerasan politikpun sangat dimungkinkan diatur oleh elit politik. Keikutsertaan masyarakat Suku Laut dalam Pilkada bisa dibilang berdasarkan kesadaran yang dibangun oleh jajaran pemerintah setempat dan adanya kehadiran kelompok kepentingan tertentu. Menurut Mohd Ezril Mohd (2018)

mengatakan kebergantungan terhadap media sosial untuk tujuan sosialisasi politik memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan dengan pengetahuan politik. Sememangnya akses media sosial pada masyarakat Suku Laut terbilag rendah dan terlebih lagi menghindari masuknya pemahaman yang salah (negatif), Seharusnya dalam upaya mencapai Pilkada yang bersih konsep pemberdayaan secara lansung yang berkaitan dengan pendidikan politik lebih dahulu dimunculkan pada masyarakat Suku Laut ketimbang pelibatan dalam Pilkada. Terlebih lagi berdasarkan DPT kebanyakan pemilih pada masyarakat Suku Laut masih tergolong sangat muda.

#### **5.4. Orientasi Evaluatif**

Dengan berbagai macam keterbatasan yang dimiliki masyarakat Suku Laut saat ini, baik itu dari segi pendidikan, kemudian relasi dan akses informasi serta minat terhadap aspek politik membuat tidak adanya penilaian yang khusus masyarakat Suku Laut terhadap proses Pilkada. Masyarakat Suku Laut memberikan penilaian terhadap Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 merupakan suatu agenda acara yang harus masyarakat ikuti, Bagi masyarakat Suku Laut Pilkada yang ikuti berjalan dengan sangat lancar, namun aspirasi yang disampaikan terkesan sangat lama direalisasikan oleh pemerintah. Pada aspek tindakan menanggapi Pilkada maka disa dilihat pada gambar 1.3, di bawah ini:

**Gambar 1.3. Sentimen sikap masyarakat Suku Laut terhadap pilkada**



Sumber: Olahan peneliti coding data interview Nvivo 12 plus 2020.

**Tabel 1.7. Keterangan Gambar 1.3.**

No	Kata	Jumlah Kata	%
1	Dibutuhkan	16	0,26
2	Gubernur	39	1,10
3	Membantu	21	0,35
4	Mestinya	15	0,25
5	Pemerintah	46	1,29
6	Memberikan	15	0,25
7	Berikan	10	0,16
8	Dibantu	14	0,23
9	Banyak	34	0,96

10	Beliau	19	0,33
----	--------	----	------

Sumber: Olahan Peneliti Nvivo 12 Plus 2020.

Tindakan masyarakat Suku Laut menanggapi Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015, tentunya menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan. Sikap dan tindakan masyarakat Suku Laut terhadap proses Pilkada atau hasil Pilkada tentunya memberikan gambaran yang lebih jelas terkait budaya politik Suku Laut. apakah tindakan tersebut bersifat individu maupun kelompok yang mungkin dipengaruhi oleh budaya yang Suku Laut miliki, Terkait hal tersebut yang penulis menemukan beberapa harapan berkenaan dengan realisasi Bantuan, namun Alpanya tindakan masyarakat Suku Laut yang ada di Kecamatan Singkep Barat dalam menanggapi proses Proses Pilkada maupun hasil dari Pilkada. Pada gambar 1.3, Menunjukkan bahwa adanya sentiment sikap masyarakat Suku Laut pada proses Pilkada Gubernur Kepri 2015. Dari hasil oleh data interview masyarakat Suku Laut terkesan pada sikap budaya politik balas budi. Gambar 1.3, jika dirangkai dalam sebuah kalimat maka akan berbunyi, *Banyaknya beliau memberikan (Nurdin Basirun), banyaknya dibantu Pemerintah apa yang dibutuhkan masyarakat Suku Laut, telah membentuk sikap mestinya membantu beliau dalam Pilkada Gubernur. Ini merupakan kondisi pemahaman politik yang jelas salah untuk di biarkan dan dilakukan terus-menerus, jika kondisi seperti ini terus berlanjut maka cita-cita Pilkada atau Pemilu yang bersih hanya menjadi omongan dan wacana belaka.*

Pada kondisi masyarakat Suku Laut saat ini, pengetahuan politik menjadi aspek yang sangat penting untuk ditingkatkan agar kemurnian sikap dan tindakan yang muncul merupakan sikap politik asli dari masyarakat Suku Laut itu sendiri. Bukan sikap politik dalam arti balas budi, bukan sikap pragmatis yang artinya menerima segala sesuatu yang instan tanpa ada berpikir kenapa harus menerima segala sesuatu tersebut. Menurut Nursyirwan, Effendi (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan pentingnya memahami kondisi politik Pilkada yang kondusif tidak membangun suasana konflik dan membangun rasa persaudaraan untuk mencapai pada budaya politik yang khas. Hal tersebutlah yang penulis maksud untuk lebih mengedepankan pengetahuan politik pada masyarakat Suku Laut.

### **5.5. Budaya politik Masyarakat Suku Laut**

Dalam lingkup akademis telah banyak kajian-kajian yang mengulas terkait budaya politik, seperti kajian (Yusuf, A. M, 2017; Rahma Surya Dewi, dkk 2017) mengungkapkan bahwa kemunculan budaya lama, kemudian pandangan agama dan masalah rasial hari ini akan membawa pada perkembangan budaya politik masyarakat dan tidak menutup suatu kemungkinan akan mengkotak-kotakkan masyarakat. Pada masyarakat Suku Laut kemungkinan terkotak-kotak akan sangat mungkin terjadi, hal tersebut bisa dilihat dari memudarnya nilai-nilai kekerabatan yang tinggi lantas munculnya sikap individual ketika dihadapkan dengan sistem politik Pilkada.

Lebih lanjut menurut Jake Christopher Richards (2017) ada tiga tren budaya politik yaitu kelompok yang lebih tua membayangkan pemberontakan sebagai indikasi kesadaran nasionalis, adanya politik protes yang terjadi di lokal dan adanya budaya politik yang dinamis antar kelompok. Menurut Indra Fauzan dan Nidzam Sulaiman (2019) budaya politik masyarakat kelas menengah yang disertai dengan nilai masyarakat merupakan suatu pemantik proses pendemokrasian. Budaya politik yang dinamis dikalangan masyarakat Suku Laut tidak terjadi pada kelompok namun lebih kepada individu ditambah lagi memandang proses demokrasi Pilkada. Sedari dulu sejak diberlakukannya relokasi (pemukiman) yang tidak diimbangi dengan pemberdayaan dibidang pendidikan yang layak budaya fragmatis sudah terbangun di masyarakat Suku Laut. Pada tabel 1.3, tingkat pendidikan masyarakat Suku Laut, jumlah angka yang paling mendominasi adalah angka tidak sekolah dan angka putus sekolah. Konsep pemberdayaan menjadi kandas dan masyarakat Suku Laut kini berkembang dengan sendirinya, tidak lagi mengarungi laut sebagai basis pembentukan nilai budaya tetapi mengarungi sistem politik negara menuju pada nilai-nilai budaya baru.

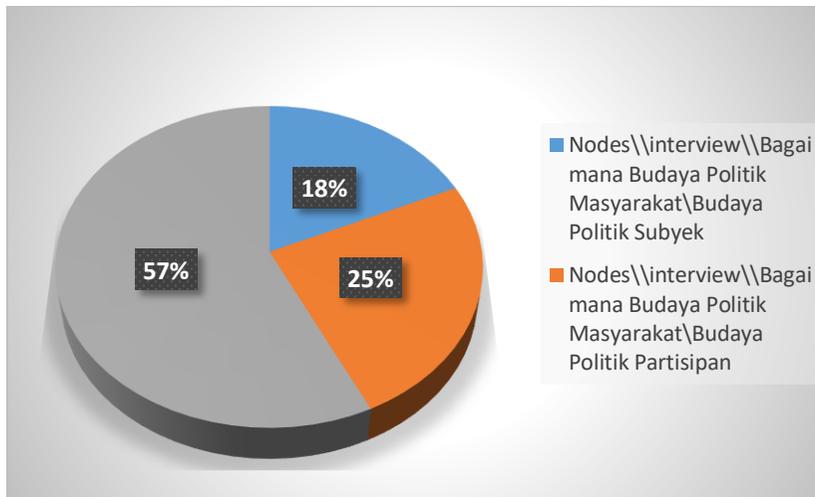
Menurut Ahmad Faidi (2018) mengungkapkan bahwa suatu nilai bisa jadi merupakan hasil konstruksi budaya politik. Lebih lanjut (Emile Chabal, 2016; A. M. Fauzi, dkk 2017). Perkembangan budaya politik hari ini bisa saja mengarah kepada jenis liberalisme baru yang kuat dengan politik

identitas atau mengarah pada budaya politik yang modern sekalipun dalam menentukan pilihan menggunakan sikap tradisional. Pertanyaan muncul apakah hari ini negara akan membiarkan kondisi masyarakat Suku Laut berkembang dengan sendirinya atau lebih menggalakkan pemberdayaan terhadap Suku Laut. Lebih lanjut pemerintah hari ini mestinya lebih memperhatikan nilai budaya lokal yang mulai memudar atau hilang karena pengaruh globalisasi. Banyak kajian yang mengungkapkan bahwa nilai budaya lokal merupakan perekat bangsa. Bahkan dalam kajian Claudia Favarato (2019) Mengungkap bahwa pentingnya agama tradisional dalam budaya politik sebagai pengimbang lajunya arus perkembangan politik. Kondisi ini kiranya bagi penulis tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Suku Laut, karena ketika diterapkan penggunaan agama tradisional masyarakat Suku Laut yaitu kepercayaan animisme, hal yang mungkin terjadi adalah kembalinya ke laut masyarakat Suku Laut yang kini sudah menetap di darat dan putusya kembali hubungan mereka dengan negara. Dalam tulisan ini mengharapkan agar dilihatnya kembali oleh pemerintah nilai-nilai budaya lokal masyarakat yang masih tersisa untuk dijaga dengan sebaik-baiknya.

Aspek-aspek orientasi politik masyarakat Suku Laut baik itu pengetahuan tentang sistem politik, perasaan dan tindakan terhadap sistem politik Pilkada yang telah penulis bahas sebelumnya kiranya membawa masyarakat Suku Laut pada tipe kebudayaan politik yang Parokial.

Menjelaskan bagaimana budaya politik masyarakat Suku Laut maka dapat dilihat dari grafik 1.1, merupakan hasil dari olah data yang telah peneliti lakukan.

**Grafik 1.1. Budaya politik masyarakat Suku Laut**



Sumber: olahan data primer Nvivo 12 Plus 2020.

Menjelaskan olahan data grafik 1.1 di atas maka didukung dengan pengklasifikasikan orientasi kognitif, afektif dan evaluatif masyarakat Suku Laut yang telah penulis bahas sebelumnya. Penulis menemukan beberapa hasil dari olahan data seperti yang telah penulis paparkan di atas hingga merujuk pada hasil budaya politik tipe parokial lebih dominan pada masyarakat Suku Laut Singkep Barat Kab. Lingga. Pada aspek budaya politik parokial hasil olah data menunjukkan 57% sedangkan pada aspek budaya politik partisipan 25% dan aspek budaya politik subyek hanya 18%. Angka positif bahwa masyarakat Suku Laut termasuk dalam kategori budaya politik parokial ini tentunya

didapatkan dari hasil analisis mendalam olah data penelitian. Terkait 28% pada aspek budaya politik partisipan, angka tersebut muncul dikarenakan masyarakat Suku Laut masih termasuk masyarakat yang menerima sistem politik dan maslah ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Kemudian 18% aspek budaya politik subjek muncul dikarenakan masyarakat Suku Laut setidaknya masih menyadari dan menerima adanya sistem politik Pilkada sekalipun tidak memahaminya dengan baik. Sekalipun budaya politik masyarakat Suku Laut hari ini masih terbelang budaya politik parokial, tetapi tidak menutup kemungkinan kebudayaan politik masyarakat Suku Laut ke depan berubah seiring berjalannya waktu. Menurut kajian Dwi Rianto Jatmiko, dkk (2019) Penelitiannya mengatakan pengaruh politik masyarakat budaya pada dasarnya membuat budaya politik komunitas masyarakat lebih beradab. Sementara itu Wasino (2015) mengatakan tiga prinsip budaya politik untuk menuju modernisasi birokrasi, yaitu nilai berani, nilai memiliki dan nilai menjaga. Perubahan kepada arah yang negatif ataupun positif nilai budaya politik Suku Laut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan tanggungjawab bersama saling membantu dan bahu membahu.

## **5.6. Faktor Yang Membentuk Budaya Politik Masyarakat Suku Laut**

Lahirnya budaya politik individu atau kelompok masyarakat semestinya memiliki faktor yang membentuk budaya politik tersebut. Pada

lingkup akademis ada banyak kajian yang mengulas terkait faktor pembentuk kebudayaan politik masyarakat. Kajian (Alip Susilo utama, 2016; Ahmad Mustanir, 2016; Babul Bahrudin, dkk, 2016) bahawa budaya matrelineal, kepemimpinan dan agama akan mempengaruhi budaya politik, baik dalam Pemilu maupun sikap dan prilaku politik masyarakat. Kajian lebih lanjut bersumber dari (Anggun Aprillia Wardhanie, 2017; Ayu Lastari, 2018) tiga faktor yaitu pendidikan, media Massa dan imbalan (ekonomi) yang mempengaruhi budaya politik masyarakat dengan tipe budaya politik Subjek-partisipan. Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015 yang diikuti sertakan oleh masyarakat Suku Laut penulis akan mengulas dengan kajian lingkup teori. Partisipasi keluarga dan kompetensi warga Negara yaitu mereka yang dapat mengungkapkan dirinya dalam keputusan keluarga cenderung memberi nilai tertinggi dalam kompetisi politik subyektif dibanding mereka yang tidak dapat mengungkapkan dirinya dalam keputusan keluarga. Partisipasi sekolah dan kompetensi warga Negara yaitu partisipasi informal di sekolah lebih terkait erat dengan kompetisi politik diantara mereka yang pendidikan terbatas dibanding mereka yang pendidikan tinggi, dimana berkaitan erat dengan kapasitas pengetahuan seseorang. Partisipasi dalam pekerjaan dan kompetensi politik yaitu adanya hubungan luasnya kesempatan berpartisipasi dalam tempat kerja akan mempengaruhi politik subyektif. (Almond dan Verba, 1984: 345-357).

**Tabel 1.8. Potensi Kemunculan kata interview faktor**

No	Kata	Keterangan
1	Tidak	Tidak ada larangan memilih dalam keluarga
2	Ada	Adanya komunikasi terkait Pilkada namun pasif
3	SD (Sekolah Dasar)	Tamat SD dan tidak tamat SD
4	Entah (tidak tahu)	Tidak tahu terkait Visi misi
5	Paham ( tidak paham)	Tidak terlalu paham dengan sistem Pemerintah

Sumber: olahan peneliti data Interview Nvivo 12 Plus 2020.

Menjelaskan tabel 1.8, di atas terkait potensi kemunculan kata dari data Interview maka bisa dilihat pada tabel 1.9 di bawah ini pengklasifikasian faktor-faktor yang membentuk Budaya politik masyarakat Suku Laut pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015.

**Table 1.9**

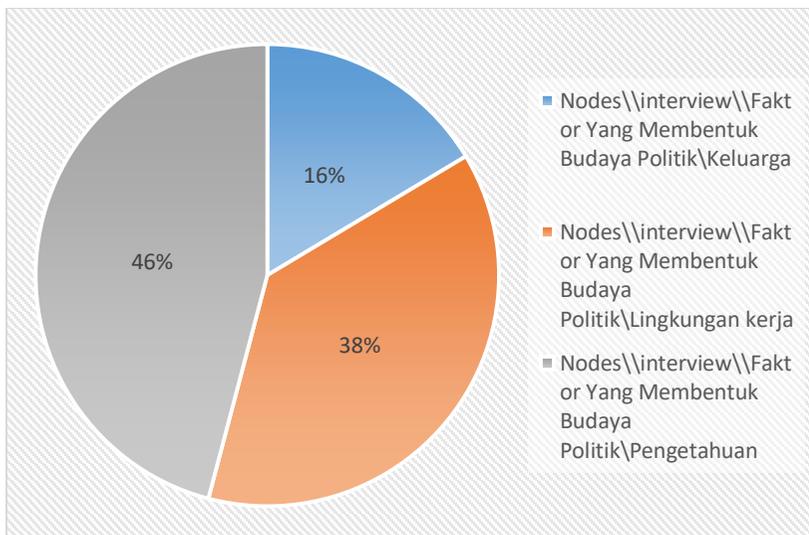
<b>Indikator Faktor-faktor yang membentuk budaya politik masyarakat Suku Laut Singkep Barat KAB. Lingga</b>		
<b>Keluarga</b>	<b>Pengetahuan</b>	<b>Lingkungan kerja</b>
1. Pada masyarakat Suku laut Tidak ada larangan dari keluarga untuk memilih calon tertentu pada Pilkada. 2. Dominasi kepala keluarga lebih tinggi hal tersebut membuat kaum perempuan Suku Laut lebih mengikuti pilihan	1. Mereka yang tamat SD lebih berbicara terhadap Pilkada ketimbang yang tidak tamat SD. 2. Rendahnya pendidikan membuat masyarakat Suku Laut enggan untuk berbicara terkait politik Pilkada.	1. Pada masyarakat Suku Laut pembicaraan terkait Pilkada Gubernur Kepri dilakukan dengan teman sesama Suku Laut hanya sekedar saja, tidak dilakukan dengan orang lain diluar Suku Laut, Rendahnya keinginan mengakses informasi.

<p>suami dalam Pilkada sekalipun tidak ada larangan dalam memilih.</p> <p>3. Pembicaraan terkait pilkada dengan keluarga terjadi namun pasif.</p>	<p>3. Minimnya pembelajaran tentang Pemilu atau Pilkada.</p> <p>4. Sekolah hanya dirasakan oleh generasi baru, namun generasi tua tidak merasakan pendidikan sekolah.</p>	<p>2. Masyarakat Suku Laut tidak mengetahui terkait Visi dan Misi calon Gubernur.</p> <p>3. Pilkada bagi masyarakat Suku Laut bukan merupakan Sesutu yang harus diutamakan untuk dibicarakan.</p>
---	---	---

Sumber: Olahan data interview 2020.

Lebih lanjut berdasarkan Tabel 1.9 di atas penulis menemukan keluarga masyarakat Suku Laut lebih bersifat egaliter, munculnya sikap enggan berbicara terkait Pilkada karena memandang diri yang minim pengetahuan, tidak ada minat yang tinggi terhadap politik Pilkada maupun mencari informasi yang berkaitan dengan Pilkada. Maka dari hasil keseluruhan olah Data yang kemudian penulis analisis ditunjukkan pada grafik 1.2 dibawah ini:

**Grafik 1.2. Faktor yang membentuk budaya politik Suku Laut**



Sumber: Olahan data primer Nvivo 12 Plus 2020.

Pada Grafik 1.2 merupakan hasil olahan data menunjukkan Pengetahuan politik merupakan faktor yang paling tinggi yaitu 46% kemudian faktor lingkungan kerja 38% dan faktor keluarga 16% dalam membentuk budaya politik masyarakat Suku Laut pada Pilkada Gubernur Kepri tahun 2015. Pengetahuan politik yang rendah pada masyarakat Suku Laut telah mempengaruhi orientasi masyarakat Suku Laut terhadap sistem Pilkada. Minimnya komunikasi terkait politik Pilkada dan relasi juga telah mempengaruhi orientasi politik masyarakat Suku Laut dan adanya sedikit dominasi Kepala keluarga masyarakat Suku Laut juga telah memberikan sedikit pengaruh terhadap orientasi politik Pilkada masyarakat Suku Laut. Mereka yang angkat bicara mengomentari pertanyaan penulis pada saat interview adalah mereka yang tamat SD (sekolah dasar). Lebih lanjut bagi masyarakat Suku Laut Pilkada bukanlah hal yang begitu penting untuk

mendapatkan perhatian lebih banyak, pemilu hanya sebagai suatu kegiatan yang boleh mereka ikuti atau boleh tidak mereka ikuti, hal tersebut tergantung pada masyarakat Suku Laut itu sendiri. Masyarakat suku laut memandang inti dari ikut sertanya mereka dalam Pemilu adalah bagaimana mereka memilih pemimpin yang mereka anggap baik, terlepas apakah mereka tahu atau tidaknya visi dan misi para calon. Menentukan calon yang baik bagi masyarakat Suku Laut kedekatan dan tatap muka merupakan bentuk yang pas untuk mereka memberikan kepercayaan kepada pasangan calon. Sebagai contoh, visi dan misi bukan aspek yang penting bagi masyarakat Suku Laut dalam menentukan pilihan politik. Penulis melihat bahwa pengetahuan politik sekali lagi menjadi hal yang sangat diperlukan masyarakat Suku Laut Saat ini. Penulis percaya Suku Laut akan menjadi berbeda sikap politiknya apabila adanya perbaikan pembelajaran dalam bidang politik. Masyarakat Suku Laut Tetap memiliki pilihan dan sikap tersendiri dalam politik, bukanlah pilihan dan sikap balas budi dan sikap yang diinstruksikan.